

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Kabupaten Tanjung Jabung Barat

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

2022



Biru Langitku!
Hijau Bumiku!

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT. dengan segala Rahmat dan Izin-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun 2022 telah selesai di susun. Penyusunan LKjIP ini di maksudkan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran melalui program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun Anggaran 2022. Dengan tujuan sebagai perwujudan akuntabilitas instansi kepada pihak-pihak yang memberi mandat, agar terciptanya sistem pelaporan yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, dan meningkatkan kinerja instansi pemerintah dan menjalankan visi misi serta di harapkan dapat terciptanya pemerintahan yang baik (*good governace*).

Laporan kinerja ini disusun berpedoman peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Laporan kinerja ini memberikan gambaran tingkat capaian kinerja berdasarkan program dan kegiatan strategis yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 khususnya tahun rencana 2022.

Saran dan masukan sangat diharapkan untuk meningkatkan kinerja OPD dimasa akan datang, sehingga OPD Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat dapat memberikan kontribusi yang lebih baik bagi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Kuala Tungkal,

2023

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT



SUPARIO. SE

Pembina Utama Muda - IV/c
Nip. 19680116 199703 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
I. PENDAHULUAN	
A. Tugas Pokok dan Fungsi	1
B. Struktur Organisasi	1
C. Sumber Daya Aparatur	9
D. Sarana dan Prasarana	11
E. Permasalahan Utama.....	13
II. PERENCANAAN KINERJA	
A. Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2022.....	15
III. AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	18
1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022.....	18
2. Capaian Kinerja tahun 2022.....	19
3. Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan target Jangka Menengah.....	22
4. Realisasi Kinerja sampai dengan tahun ini dengan Standar nasional.....	23
5. Analisis Penyebab kegagalan dan Keberhasilan atau peningkatan penurunan kinerja serta alternative solusi yang dilakukan.....	24
6. Analisis program kegiatan penunjang kegagalan dan Keberhasilan Ataupun kegagalan pencapaian perntaan kinerja.....	25
7. Realisasi Anggaran tahun 2022.....	31
VI. PENUTUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat mempunyai Tugas pokok dan fungsi, Yaitu; melaksanakan sebagian kewenangan Kabupaten dalam urusan pengelolaan lingkungan hidup yang meliputi Bidang Tata Lingkungan, Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup serta Penaatan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup.

B. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat memiliki Struktur Organisasi sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 47 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

Pada Bab III Susunan Organisasi Pasal 1 huruf a sampai g bahwa Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari :

Kepala Dinas

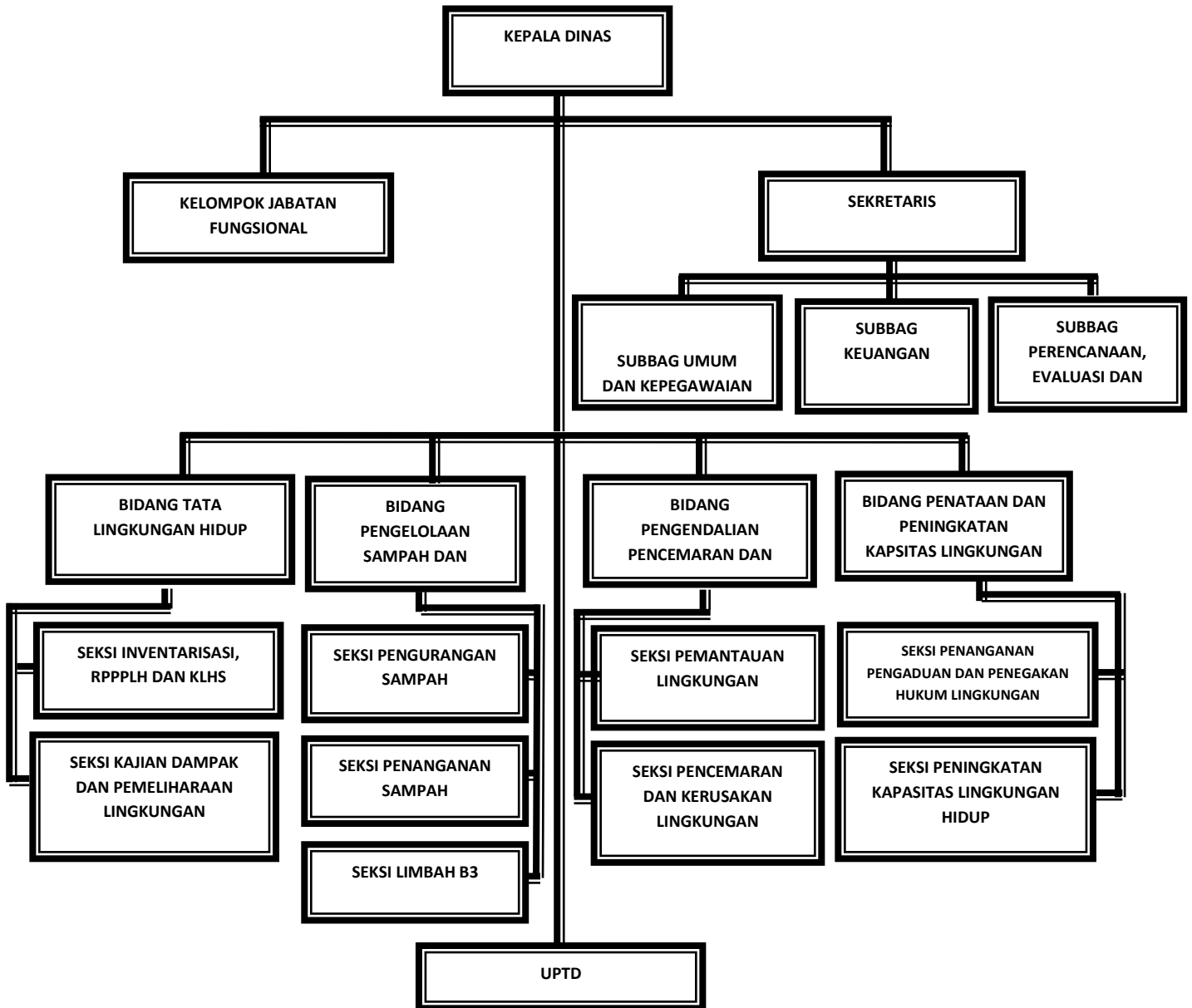
a. Sekretariat dipimpin seorang Sekretaris, terdiri dari :

1. Subbagian Umum dan Kepegawaian

2. Subbagian Keuangan
 3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan Program
- b. Bidang Tata Lingkungan Hidup dipimpin oleh Seorang Kepala Bidang terdiri dari :
1. Seksi Inventarisasi RPPLH dan KLHS
 2. Seksi Kajian Dampak dan Pemeliharaan Lingkungan Hidup.
- c. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 dipimpin Seorang Kepala Bidang, Terdiri dari :
1. Seksi Pengurangan Sampah;
 2. Seksi Penanganan Sampah; dan
 3. Seksi Limbah B3
- d. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup dipimpin oleh Seorang Kepala Bidang Terdiri dari :
1. Seksi Pemantauan Lingkungan; dan
 2. Seksi Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan
- e. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup dipimpin Seorang Kepala Bidang, Terdiri dari :
1. Seksi Penanganan Pengaduan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup;
- dan
2. Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup
- f. Unit Pelaksana Teknis Dinas; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional

Adapun Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat, sebagaimana gambar pada halaman berikut :

**STRUKTUR ORGANISASI BADAN LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**



Sedangkan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat berpedoman pada Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 47 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Sebagai berikut :

1. Terkait dengan Tugas Pokok. Kepala Dinas Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan sebahagian urusan Pemerintah Kabupaten di Bidang Lingkungan Hidup, dan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan kebijakan di bidang tata lingkungan hidup, pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 - b. pelaksanaan kebijakan di bidang tata lingkungan hidup, pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang tata lingkungan hidup, pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas di bidang tata lingkungan hidup, pengelolaan sampah dan limbah B3, pengendalian pencemaran dan

kerusakan lingkungan hidup, penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup; dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di Bidang Kesekretariatan dan mempunyai fungsi;

a. koordinasi penyusunan rencana strategis, rencana kerja, rencana program dan anggaran, pelaporan perencanaan dan akuntabilitas kinerja;

b. pembinaan dan penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian meliputi: ketatausahaan, kepegawaian, penatausahaan aset dan perlengkapan, kerja sama, hubungan masyarakat, dan kearsipan;

c. pembinaan dan penyelenggaraan urusan keuangan meliputi: perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, dan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP);

d. koordinasi dan penyusunan peraturan perundangundangan;

e. pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

3. Kepala bidang Tata Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di Bidang Tata Lingkungan Hidup dan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja di bidang tata lingkungan hidup;
 - b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi lingkup inventarisasi, RPPLH dan KLHS meliputi: pengelolaan RPPLH, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, ekonomi lingkungan hidup, sinkronisasi RLPLH nasional, penyusunan NSDA dan LH, SLHD, indeks kualitas lingkungan hidup, sosialisasi RPPLH, dan pengelolaan KLHS;
 - c. penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi lingkup kajian dampak lingkungan meliputi: pencegahan pencemaran lingkungan, izin lingkungan, pengelolaan sumber daya alam, upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, inventarisasi GRK dan penyusunan profil emisi GRK, konservasi keanekaragaman hayati, dan pemeliharaan lingkungan;
 - d. penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi lingkup pemeliharaan lingkungan hidup meliputi: pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan lingkungan hidup; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.
4. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3, dan mempunyai fungsi;

- a. penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja di bidang pengelolaan sampah dan limbah B3;
 - b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi lingkup pengurangan sampah meliputi: pengolahan data pengurangan sampah, pengelolaan bahan baku produksi dan kemasan, pendaur ulangan sampah, fasilitas pengelolaan dan pemanfaatan sampah;
 - c. penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi lingkup penanganan sampah meliputi: operasional kebersihan dan pembuangan, sistem tanggap darurat, sarana dan prasarana persampahan, serta perizinan pengolahan sampah;
 - d. penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi lingkup limbah B3 meliputi: pelayanan perizinan dan pengolahan limbah B3; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
5. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup, dan mempunyai fungsi
- a. penyusunan, pelaksanaan, pemantuan, dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;

- b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi lingkup pemantauan lingkungan hidup meliputi: pemantauan lingkungan dan baku mutu lingkungan;
 - c. penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi lingkup pengendalian pencemaran lingkungan meliputi: pemantauan, penanggulangan, pemulihan pencemaran institusi dan non institusi, serta sistem informasi kondisi lingkungan hidup;
 - d. penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi lingkup pengendalian kerusakan lingkungan meliputi: tindak lanjut rekomendasi hasil, kriteria baku kerusakan, pemantauan kerusakan lingkungan, penanggulangan kerusakan, pemulihan lingkungan; dan;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.
6. Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kepala Dinas di Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup, dan mempunyai fungsi
- a. penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi serta pelaporan program dan rencana kerja di bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 - b. penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi lingkup pengaduan dan penyelesaian sengketa lingkungan

- meliputi: pengelolaan pengaduan, pelayanan perizinan, sosialisasi, sengketa lingkungan dan rekomendasi pengaduan;
- c. penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi lingkup penegakan hukum lingkungan meliputi: pembinaan, penegakan hukum atas pelanggaran dan penyidikan perkara pelanggaran;
 - d. penyiapan perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi lingkup peningkatan kapasitas lingkungan hidup meliputi: perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, penetapan dan pemberdayaan MHA, pendidikan dan pelatihan, pemberian penghargaan dan;
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan terkait dengan tugas dan fungsinya.

C. Sumber Daya Aparatur

Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat, berdasarkan Golongan Kepangkatan keadaan bulan Desember 2022 dapat di lihat pada tabel dibawah ini :

Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Berdasarkan Golongan Kepangkatan

NO.	STATUS	GOLONGAN KEPANGKATAN					JUMLAH
		IV	III	II	I	Lainnya	
1.	PNS	7	13	3	-	-	23
2.	CPNS	-	-	-	-	-	-
3.	TKK	-	-	-	-	40	40
4.	Petugas Persampahan	-	-	-	-	214	214
5.	Petugas Taman	-	-	-	-	22	22
JUMLAH		7	13	3	-	276	299

Dari tabel diatas terlihat bahwa Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat Golongan IV ada 7 orang, Golongan III ada 13 orang, Golongan II ada 3 orang, sedangkan Tenaga Kerja Kontrak (TKK) Sebanyak 40 Orang, Petugas Persampahan (Kebersihan) sebanyak 214 Orang serta petugas taman sebanyak 22. Selanjutnya mengenai Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat berdasarkan tingkat Pendidikan adalah sebagai berikut :

**Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat
Berdasarkan Tingkat Pendidikan**

NO	STATUS	TINGKAT PENDIDIKAN						
		S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	Lainnya
1.	PNS	1	14	6	3	-	-	-
2.	CPNS	-	-	-	-	-	-	-
3.	TKK	-	15	-	25	-	-	-
4.	Petugas Persampahan							214
5.	Petugas Taman				8	3	1	10
JUMLAH		1	29	6	36	3	1	224

Tabel diatas memperlihatkan bahwa 299 orang pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Tingkat Pendidikannya S2 1 orang, S1 29 orang, D3 6 orang, SLTA 36 orang, SLTP 3 orang dan SD 1 orang, petugas persampahan 220 orang serta Petugas Taman berjumlah 22 orang. Adapun Pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat menurut Tingkat Jabatan dapat dilihat pada tabel 2.3 di bawah ini :

Tingkat Jabatan Pegawai Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

NO.	TINGKAT JABATAN	JUMLAH ORANG	KETERANGAN
1.	ESELON II	1	Kepala Dinas
2.	ESELON III	5	Sekretaris / Kabbid
3.	ESELON IV	12	Kasubag /Kepala Seksi
4.	STAF	7	
5.	TKK	40	-
6.	Petugas Persampahan	214	-
7.	Petugas Taman	22	-
Jumlah		285	

D. Sarana dan Prasarana

Adapun mengenai Sarana dan Prasarana yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat sebagai pendukung Pelaksanaan Program dan Kegiatan adalah sebagai berikut :

Sarana dan Prasarana Pada Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Tanjung Jabung Barat 2022.

No	Nama Jenis Barang	Merk Barang	Jumlah Barang (Unit)	Kondisi Barang	Ket
1	- Gedung Bangunan kantor - Gedung Bangunan kantor	Jl. Beringin Kuala Tungkal	1	Baik	
		Jl. Beringin Kuala Tungkal	1	Baik	
2	Kendaraan Operasional	Kijang Inova	1	KB	
		Isuzu Dmax	1	B	
		Isuzu Panther	1	KB	
		Ford Ranger	1	B	
		Toyota Rush	1	B	
		Dump Truck Roda 6	6	4B/2KB	
		Dump Truck Armroll	1	KB	
		Backhoe Loader	1	KB	

No	Nama Jenis Barang	Merk Barang	Jumlah Barang (Unit)	Kondisi Barang	Ket
		Excavator	2	1RB/1KB	
		Kendaraan Roda 3	7	B	
		Perahu Motor	1	B	
3	Sepeda Motor / Kendaraan Roda Dua	Sepeda motor	22	KB	
4	Alat Labor	Gps map	1	KB	
		Ph meter	1	KB	
		Gas analyzer / gas analysis	1	KB	
		Hvs	1	RB	
		Sound level meter	1	KB	
		Analytical balance electronic	1	RB	
		Analytical balance non electronic	1	KB	
		Cod meter	1	KB	
		Anemometer	1	KB	
		Do meter	1	KB	
		Turbidimeter	1	KB	
		Gas sampler	1	KB	
		Combustion gas	1	KB	
		Opacity meter	1	KB	
		Botol sampler 100 ml	1	KB	
		Botol sampler 500 ml	1	KB	
		Ice box	1	KB	
5	PC / Komputer	PC / Komputer	11	B	
6	Laptop	Toshiba, Axioo, Sony, Dell	7	B	
7	Printer	HP , Canon	7	B	
8	Camera		2	B	
9	Faximili	Panasonic	1	B	
10	Telepon	Asia Phone	1	B	
11	Mesin Tik	Manual Standar	1	B	
12	Proyektor	Toshiba, HP	2	B	
13	AC	LG, Samsung, Jetcool	10	KB	
14	Mesin Genset	Yamamoto	1	B	
15	Meja ½ biro	kayu	35	B	
16	Meja 1 biro	Kayu	2	B	
17	Filling Cabinet (3 pintu)	Daiko, Unital	5	B	

No	Nama Jenis Barang	Merk Barang	Jumlah Barang (Unit)	Kondisi Barang	Ket
18	Filling Cabinet (4 pintu)	Daiko, Unital	5	B	
19	Lemari arsip	Kayu, kaca, besi	14	B	
20	Kursi rapat / kerja		67	B	
21	Kursi tunggu	Besi	2	KB	
22	Lemari	Kaca	1	B	
		Kayu Kaca / 4 pintu	5	B	
		Kayu Kaca / 2 pintu	5	B	
		Arsip Besi / Lion	3	KB	
23	Mesin Potong Rumput	Campuran	7	B	

*ket: (B:Baik, KB:Kurang Baik, RB:Rusak Berat)

E. Permasalahan Utama (Strategic issued)

Pada tahun 2021 ada beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat, diantaranya :

1. Khusus yang terkait dengan bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup permasalahan utama yang dihadapi masih terkendala pada oprasional seperti kendaraan, dan anggaran yang belum memadai sehingga untuk pelaksanaan pemantauan limbah cair dan udara masih belum maksimal.
2. Pada bidang penataan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup permasalahan yang dihadapi terkait dengan penegakan hukum lingkungan. Minimnya sumber daya manusia (instrument pengawas) yang menguasai bidang hukum lingkungan masih kurang di Dinas Lingkungan Hidup Tanjung Jabung Barat.
3. Pada bidang pengelolaan sampah dan limbah B3 permasalahan yang dihadapi terkait dengan masih tingginya pencemaran sampah yang

dihasilkan rumah tangga dan Dunia Usaha yang ada di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang diakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat, mengenai Lingkungan Hidup yang tidak tercemar polusi Permasalahan lainnya juga terkait sarana dan prasarana yang ada belum mendukung dalam pengelolaan persampahan, jumlah personil yang masih kurang, dana yang masih terbatas dan honorium dan kesejahteraan petugas masih rendah.

4. Pada bidang tata lingkungan hidup permasalahan yang dihadapi terkait dengan kurangnya pendanaan dalam melakukan monitoring dunia usaha atau kegiatan dan terbatasnya sumber daya manusia dalam melakukan monitoring mengingat kegiatan tersebut bersifat teknis. Permasalahan lainnya terkait adanya pembatasan kewenangan dalam melakukan pengawasan khusus untuk kegiatan pertambangan mengingat perizinan dan monitoring telah diambil alih oleh Provinsi Jambi, hal ini sesuai dengan undang-undang nomor 23 Tahun 2014 dimana terjadi pembatasan kewenangan antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Ikhtisar Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Berdasarkan Perbup Tanjung Jabung Barat Nomor 18 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026 Dinas Lingkungan Hidup mengampu Sasaran Strategis nomor 8 yakni “Terjaganya Kelestarian Lingkungan Hidup” yang indikator kinerjanya “Indeks Kualitas Lingkungan Hidup”.

**Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah
Kabupaten Tanjung Jabung Barat Tahun 2021-2026**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Formulasi	Bidang/Urusan
8	Terjaganya Kelestarian Lingkungan Hidup	8. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	$IKLH = \frac{IPA + IPU + ITH}{3}$	Lingkungan Hidup

Berdasarkan IKU Kabupaten Tanjung Jabung Barat tersebut Dinas Lingkungan Hidup memiliki 3 (tiga) sasaran strategis dan 6 (enam) indikator kinerja yang terdapat didalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1. Kualitas Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan Hidup di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Meningkat dan atau Menjaga Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68,60
2. Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Indeks Pengelolaan Sampah	35,62
	Persentase Usaha/Kegiatan Yang Menaati Peraturan Perundang-Undangan Bidang Lingkungan Hidup	90%
3. Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Indeks Kepuasan Masyarakat	85%
	Nilai SAKIP	70
	Persentase Penurunan Temuan Inspektorat/BPKP	100%

Terkelolanya sumber daya alam dan fungsi lingkungan hidup secara baik, dan terpeliharanya kualitas sumber daya air, tanah, dan udara akan dapat meningkatkan dan mempertahankan kualitas lingkungan hidup guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, melalui sinergi antara penataan ruang dengan penggunaan lahan yang berbasis daya dukung, dan melakukan pemantauan terhadap kualitas air sungai, tanah, dan udara ambien.

Penataan dan penegakan hukum diarahkan untuk penanganan kasus-kasus lingkungan dengan mengoptimalkan kinerja pejabat penyidik pengawas lingkungan. Penegakan hukum merupakan salah satu cara atau strategi dalam penataan standar, baku mutu, dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

Pengelolaan lingkungan hidup tidak hanya menjadi tanggung jawab aparaturnya dan pemangku kepentingan (stakeholder) tetapi juga menjadi tanggung jawab masyarakat sebagai pengguna/terdampak dari perubahan lingkungan, untuk itu perlunya meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memelihara sumber daya alam dan lingkungan hidup yang sehat melalui pelatihan dan sosialisasi.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capain Kinerja Organisasi

1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Sumber Data
Kualitas Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan Hidup di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Meningkat dan atau Menjaga Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68,60	69,61	Laporan Kinerja
Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Indeks Pengelolaan Sampah	35,62	22,21	Laporan Kinerja
	Persentase Usaha/Kegiatan Yang Menaati Peraturan Perundang-Undangan Bidang Lingkungan Hidup	90%	90%	Laporan Tahunan
Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Indeks Kepuasan Masyarakat	85%	85%	Survei Masyarakat
	Nilai SAKIP	70	64,51	LHE Sakip
	Persentase Penurunan Temuan Inspektorat/BPKP	100%	100%	Dokumen Keuangan

2. Capaian Kinerja Tahun 2022

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi	Capaian	Sumber Data
Kualitas Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan Hidup di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Meningkat dan atau Menjaga Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	69,61	100%	Laporan Kinerja
Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Indeks Pengelolaan Sampah	22,21	62,34%	Laporan Kinerja
	Persentase Usaha/Kegiatan Yang Menaati Peraturan Perundang-Undangan Bidang Lingkungan Hidup	90%	100%	Laporan Tahunan
Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Indeks Kepuasan Masyarakat	85%	100%	Survei Masyarakat
	Nilai SAKIP	64,51	92,16%	LHE Sakip
	Persentase Penurunan Temuan Inspektorat/BPKP	100%	100%	Dokumen Keuangan

Berdasarkan tabel di atas, uraian capaian kinerja tahun 2022 sebagai berikut :

1. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup
 - IKLH yang untuk tahun 2022 ini sudah melebihi target. Realisasi tahun 2022 yakni 69,61. Komponennya meliputi Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Tutupan Lahan (ITH).

$$\begin{aligned} \text{IKLH 2022} &= (0,376 \times \text{IKA}) + (0,405 \times \text{IKU}) + (0,219 \times \text{IKL}) \\ &= 69,61 \end{aligned}$$

Sumber Formulasi: PermenLHK No. 27 Tahun 2021

1) Indeks Kualitas Air (IKA)

- Parameter perhitungan IKA meliputi 7 parameter, untuk tahun 2022 Kab. Tanjung Jabung Barat mendapatkan hasil perhitungan **IKA 50.00**

2) Indeks Kualitas Udara (IKU)

- Indeks Kualitas Udara pada tahun 2022 yang dilakukan Kab. Tanjung Jabung Barat mendapatkan hasil **94.46 (kualitas Baik)**.

3) Indeks Kualitas Lahan (IKL)

- Indeks Kualitas Lahan pada tahun 2022 yang dilakukan Kab. Tanjung Jabung Barat mendapatkan hasil **54.94**

Untuk capaian IKLH tahun 2022 100%. Namun untuk titik sampling yang diambil pada tahun 2022 lebih sedikit dibandingkan tahun sebelumnya.

- Permasalahan yang dihadapi pada tahun 2022 adalah kurangnya titik sampel air dan udara yang digunakan untuk melakukan perhitungan dikarenakan kurangnya anggaran.

Agar nilai Indeks yang dihasilkan dapat mewakili kondisi Kabupaten Tanjung Jabung Barat yang sebenarnya maka diperlukan tambahan titik sampling pengukuran Udara dan Air. Selain itu diperlukan juga pengukuran Indeks Kualitas Lahan yang dilakukan sendiri oleh pemerintah DLH Kabupaten Tanjung Jabung Barat.

2. Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup

- Pada tahun 2022, telah terjadi penurunan jumlah pengaduan lingkungan hidup akibat dugaan pencemaran lingkungan hidup di Kabupaten Tanjung Jabung Barat dan kemampuan Sumber Daya Alam (SDA) dapat memahami kebutuhan masyarakat dengan cukup baik. Hal tersebut juga disertai dengan kegiatan

peningkatan kapasitas dan kemampuan masyarakat dalam mengelola lingkungan secara sederhana sehingga indikator kinerja terealisasi sesuai target dengan capaian 100%.

- Pengaduan lingkungan hidup dugaan pencemaran lingkungan menurun pada tahun 2022, 2 pengaduan yang diselesaikan secara musyawarah dan dilaksanakannya kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat. Selain itu juga telah dilaksanakannya penanaman pohon penghijauan untuk mengelola lingkungan dengan baik di desa-desa pilihan pada 13 kecamatan di Kab. Tanjung Jabung Barat.

3. Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3

Sebanyak 14.499 Ton sampah yang masuk ke TPA namun angka ini hanya estimasi karena untuk besaran yang lebih terukur diperlukan adanya jembatan timbang. sampah yang masuk ke TPA Lubuk Terentang dapat ditangani sepenuhnya namun sampah yang masuk ke landfill masih terkendala dalam pengaturan sampah yang masuk dikarenakan volume sampah yang seharusnya ditimbun tidak dapat dilaksanakan dikarenakan keterbatasan anggaran yang tidak memungkinkan untuk menimbun.

Adapun permasalahan yang dihadapi yakni :

- Terbatasnya Prasarana Dan Sarana Yang Menunjang Kegiatan Dimaksud
- Kurangnya Petugas Penyapu Jalan, Drainase, Serta Pemotong Rumput Karena Cakupan Luasan Wilayah Kerja Semakin Bertambah Sesuai Dengan Pertumbuhan Dan Perkembangan Penduduk
- Kurangnya Peralatan Yang Memadai
- Upah Masih Dibawah Umr

4. Bidang Tata Lingkungan

- Selama tahun 2022 sebanyak 4 perusahaan yang telah mengirimkan laporan dokumen Rencana Pelaksanaan

Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL). hal ini dikarenakan sudah beralihnya tupoksi izin lingkungan ke Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu maka dari itu dalam hal izin Dinas Lingkungan Hidup hanya merekomendasikan.

- Permasalahan yang dihadapi ada beberapa perusahaan yang belum menyampaikan laporan dokumen RKL-RPL dan UKL-UPL, dan para pegawai Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat tidak bisa melakukan survei ke beberapa perusahaan yang belum menyampaikan dokumen tersebut dikarenakan keterbatasan anggaran untuk survei lapangan sebab banyak perusahaan yang berada di luar daerah.

Berdasarkan Permen LH No 16 Tahun 2012 tentang pedoman penyusunan dokumen lingkungan hidup bahwa setiap usaha dan atau kegiatan yang tidak termasuk kriteria wajib amdal, wajib memiliki Dokumen RKL-RPL dan wajib melaporkan setiap per 6 (enam) bulan sehubungan dengan PP 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan mewajibkan pemegang izin lingkungan wajib menyampaikan Laporan RKL-RPL dan Laporan UKL-UPL secara berkala setiap 6 bulan sekali (Pasal 53).

3. Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah

Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi						Sumber Data
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Kualitas Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan Hidup di Wilayah Kabupaten Tanjung	Meningkat dan atau Menjaga Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	-	69,61	-	-	-	-	Laporan Kinerja

Sasaran Strategis	Indikator	Realisasi						Sumber Data
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Jabung Barat								
Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat	Indeks Pengelolaan Sampah	14,11	22,21	-	-	-	-	Laporan Kinerja
	Persentase Usaha/Kegiatan Yang Menaati Peraturan Perundang-Undangan Bidang Lingkungan Hidup	100%	90%	-	-	-	-	Laporan Tahunan
Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Indeks Kepuasan Masyarakat	80%	85%	-	-	-	-	Survei Masyarakat
	Nilai SAKIP	60,50	64,51	-	-	-	-	LHE Sakip
	Persentase Penurunan Temuan Inspektorat/BPKP	100%	100%	-	-	-	-	Dokumen Keuangan

4. Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Standar Nasional

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Realisasi Target Kinerja						Sumber data
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Nihil									

5. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan Atau Peningkatan / Penurunan

Kinerja Serta Alternative Solusi Yang Telah Dilakukan.

- Pencapaian sasaran strategis “Kualitas Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan Hidup di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat ”.
Keberhasilan pencapaian sasaran strategis “Kualitas Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan Hidup di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat” selain sudah merupakan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Tanjung Jabung Barat yang harus dilaksanakan juga tidak terlepas dari pemantauan berkala kualitas lingkungan dan koordinasi dengan pihak perusahaan dalam hal memfasilitasi pengambilan sampel, dan juga tersedianya laboratorium DLH Provinsi Jambi yang jaraknya masih dapat ditempuh dengan kendaraan.
- Keberhasilan pencapaian sasaran strategis “Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat”.
Keberhasilan pencapaian sasaran strategis “Pengelolaan dan Pengendalian Lingkungan Hidup di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Barat” dicapai melalui 4 (Keg) kegiatan utama yang mendukung pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan, adapun 4 (keg) kegiatan tersebut yaitu (1) Kegiatan pengelolaan B3 dan Limbah B3, (2) Pengkajian dampak lingkungan hidup, (3) Penataan Hukum Lingkungan, dan (4) Pemantauan Kerusakan lingkungan.
- Keberhasilan pencapaian sasaran strategis “Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan”.
Keberhasilan pencapaian sasaran strategis “Kualitas Pelayanan Publik, Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan”, karena pengaduan – pengaduan dari masyarakat adanya dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan yang masuk/diterima dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat semuanya telah selesai.

6. Analisis Program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja Tahun 2022

NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN REALISASI
1	2	3	4	5	6
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penyediaan komponen Penunjang Pelayanan Kantor			
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya penyusunan anggaran dan mengevaluasi anggaran DLH tiap bulan dan tahun			
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya penyusunan renstra dan renja DLH	8 Dokumen	8 Dokumen	100,00
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Melaksanakan koordinasi dalam penyusunan RKA DLH	4 Dokumen	4 Dokumen	100,00
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Keuangan Tahunan OPD			
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	24 Orang /bulan	24 Orang /bulan	100,00
4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	Tersusunnya laporan keuangan DLH	4 Laporan	4 Laporan	100,00
6	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersusunnya laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran setiap tahun	2 Dokumen	2 Dokumen	100,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Perangkat Daerah			
7	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	69 Paket	69 Paket	100,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum			
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Belanja Alat Tulis Kantor	900 Paket	900 Paket	100,00
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Kebutuhan Akomodasi Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah	1 Laporan	1 Laporan	100,00

NO	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN REALISASI
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah			
10	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Belanja Prangko, materai, bend a pos & jasa pengiriman surat	1 Laporan	1 Laporan	100,00
11	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Pembayaran Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	1 Laporan	1 Laporan	100,00
12	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Belanja Alat - alat kebersihan kantor & jasa tenaga kebersihan	1 Laporan	1 Laporan	100,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah			
13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya Jasa Sopir, Biaya Pemeliharaan, Perbaikan & Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	34 Unit	34 Unit	100,00
14	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang DipeliharaPersentase penyediaan komponen Penunjang Pelayanan Kantor	19 Unit	19 Unit	100,00
15	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpenuhinya Biaya pemeliharaan Belanja Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3 Unit	3 Unit	100,00
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP			
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Terlaksananya penyusunan dokumen DDDTLH, Dokumen RPPLH yang dilegalisasi			
16	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Ddokumen DDDTLH, dokumen RPPLH dan legalisasi RPPLH	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah KLHS			

NO	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN REALISASI
17	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Dokumen KLHS RDTR kawasan perkotaan/perdesaan	6 Dokumen	6 Dokumen	
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	IKA/IKU/IKTL/IKAL/I KEG			
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup			
18	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Indeks kualitas tutupan lahan, indeks kualitas air, indeks kualitas udara.	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
19	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Dokumen RAD GRK, dokumen pemantauan emisi GRK	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Dokumen Rencana Pengelolaan Gambut (RPG)			
20	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Dokumen Rencana Pengelolaan Gambut (RPG)	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	PERSENTASE PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)			
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota			
21	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Dokumen rencana pengelolaan keanekaragaman hayati dan legalisasi	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
22	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	RTH yang dikelola	20 Ha	20 Ha	100,00
23	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah bibit/unit	18 Unit Taman	18 Unit Taman	100,00

NO	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN REALISASI
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	PERESENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) PADA USAHA/KEGIATAN			
	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Persentase Penyimpanan Sementara Limbah B3			
24	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan	1 Laporan	1 Laporan	100,00
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)			
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
25	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan dan jumlah sosialisasi	15 dokumen	2 dokumen	13,33
26	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PPLH yang mengikuti pengembangan kapasitas PPLH dan Fungsional PEDAL	2 orang	2 Orang	100,00
	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	CAKUPAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH			
	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan	Data inventarisasi MHA Kearifan Lokal di Kab. Tanjung Jabung Barat			

NO	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN REALISASI
	PPLH				
27	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Data inventarisasi MHA Kearifan Lokal di Kab. Tanjung Jabung Barat	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	PERESENTASE MASYARAKAT KECAMATAN YANG MENINGKAT PENGETAHUAN / PEMAHAMAN TERKAIT LINGKUNGAN HIDUP			
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sosialisasi/pelatihan			
28	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah sosialisasi/pelatihan	6 Lembaga	6 Lembaga	100,00
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERSENTASE PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP YANG DITINDAK LANJUTI			
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota			
29	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Persentase jumlah pengaduan masyarakat yang terselesaikan	3 Dokumen	2 Pengaduan	66,67
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	PERSENTASE PENGELOLAAN PERSAMPAHAN			
	Pengelolaan Sampah	Persentase			

NO	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	CAPAIAN REALISASI
		Pengelolaan Sampah			
30	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Tonase sampah yang terangkut/petugas kebersihan/petugas TPA	75.000 Ton	14.499 Ton	19,33
31	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah TPST3R/unit/alat berat	1500 Unit	1120 unit	74,67
Jumlah Total 31 Sub Kegiatan					

Realisasi Anggaran Tahun 2022

NO	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN REALISASI
1	2	3	4	5	6
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase penyediaan komponen Penunjang Pelayanan Kantor	4.771.317.343	4.273.051.004	89,56
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya penyusunan anggaran dan mengevaluasi anggaran DLH tiap bulan dan tahun	147.325.000	146.900.000	99,71
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya penyusunan renstra dan renja DLH	51.000.000	50.650.000	99,31
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Melaksanakan koordinasi dalam penyusunan RKA DLH	96.325.000	96.250.000	99,92
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Laporan Keuangan Tahunan OPD	3.819.921.642	3.414.411.324	89,38
3	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	3.431.296.642	3.033.336.324	88,40
4	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan tugas ASN	256.440.000	248.890.000	97,06
5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersusunnya laporan keuangan DLH	74.030.000	74.030.000	100,00
6	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersusunnya laporan dan analisis prognosis realisasi anggaran setiap tahun	58.155.000	58.155.000	100,00
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Perangkat Daerah	26.350.000	26.350.000	100,00
7	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	26.350.000	26.350.000	100,00
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Umum	420.519.516	405.702.784	96,48
8	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya Belanja Alat Tulis Kantor	129.647.116	128.047.116	98,77
9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersedianya Kebutuhan Akomodasi Rapat-rapat Koordinasi & Konsultasi ke Luar Daerah	290.872.400	277.655.668	95,46
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	103.871.185	91.876.996	88,45
10	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Terlaksananya Belanja Prangko, materai, benda pos & jasa pengiriman surat	2.500.000	2.500.000	100,00
11	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya Pembayaran Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik	79.800.000	67.805.811	84,97
12	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Belanja Alat - alat kebersihan kantor & jasa tenaga kebersihan	21.571.185	21.571.185	100,00
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	253.330.000	214.159.900	84,54

NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN REALISASI
13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpenuhinya Jasa Sopir, Biaya Pemeliharaan, Perbaikan & Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	195.690.000	158.730.900	81,11
14	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang DipeliharaPersentase penyediaan komponen Penunjang Pelayanan Kantor	37.240.000	35.029.000	94,06
15	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpenuhinya Biaya pemeliharaan Belanja Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	20.400.000	20.400.000	100,00
	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	JUMLAH DOKUMEN PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	1.499.900.000	1.151.464.000	76,77
	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Terlaksananya penyusunan dokumen DDDTLH, Dokumen RPPLH yang dilegalisasi	34.265.000	33.000.000	96,31
16	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Ddokumen DDDTLH, dokumen RPPLH dan legalisasi RPPLH	34.265.000	33.000.000	96,31
	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah KLHS	1.465.635.000	1.118.464.000	76,31
17	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Dokumen KLHS RDTR kawasan perkotaan/perdesaan	1.465.635.000	1.118.464.000	76,31
	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	IKA/IKU/IKTL/IKAL/IKEG	1.556.950.000	248.240.460	15,94
	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.476.700.000	168.146.460	11,39
18	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Indeks kualitas tutupan lahan, indeks kualitas air, indeks kualitas udara.	1.441.200.000	132.646.460	9,20
19	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Dokumen RAD GRK, dokumen pemantauan emisi GRK	35.500.000	35.500.000	100,00
	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Dokumen Rencana Pengelolaan Gambut (RPG)	80.250.000	80.094.000	99,81
20	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Restorasi	Dokumen Rencana Pengelolaan Gambut (RPG)	80.250.000	80.094.000	99,81
	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	PERSENTASE PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	726.350.000	715.390.995	98,49
	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	726.350.000	715.390.995	98,49

NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN REALISASI
21	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Dokumen rencana pengelolaan keanekaragaman hayati dan legalisasi	34.265.000	34.250.000	99,96
22	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	RTH yang dikelola	444.340.000	441.466.995	99,35
23	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah bibit/unit	247.745.000	239.674.000	96,74
	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	PERESENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3) PADA USAHA/KEGIATAN	380.613.000	233.647.710	61,39
	Penyimpanan Sementara Limbah B3	Persentase Penyimpanan Sementara Limbah B3	380.613.000	233.647.710	61,39
24	Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan	380.613.000	233.647.710	61,39
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	PERSENTASE PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	69.515.000	67.265.000	96,76
	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan dan Pengawasan terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	69.515.000	67.265.000	96,76
25	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan dan jumlah sosialisasi	34.265.000	34.265.000	100,00
26	Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup	Jumlah PPLH yang mengikuti pengembangan kapasitas PPLH dan Fungsional PEDAL	35.250.000	33.000.000	93,62
	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	CAKUPAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH	27.665.000	27.650.000	99,95
	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Data inventarisasi MHA Kearifan Lokal di Kab. Tanjung Jabung Barat	27.665.000	27.650.000	99,95
27	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Data inventarisasi MHA Kearifan Lokal di Kab. Tanjung Jabung Barat	27.665.000	27.650.000	99,95

NO	URAIAN PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR	JUMLAH ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN	CAPAIAN REALISASI
	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	PERESENTASE MASYARAKAT KECAMATAN YANG MENINGKAT PENGETAHUAN / PEMAHAMAN TERKAIT LINGKUNGAN HIDUP	27.665.000	27.650.000	99,95
	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sosialisasi/pelatihan	27.665.000	27.650.000	99,95
28	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah sosialisasi/pelatihan	27.665.000	27.650.000	99,95
	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	PERSENTASE PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP YANG DITINDAK LANJUTI	34.265.000	34.250.000	99,96
	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Persentase Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	34.265.000	34.250.000	99,96
29	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Persentase jumlah pengaduan masyarakat yang terselesaikan	34.265.000	34.250.000	99,96
	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	PERSENTASE PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	7.364.949.132	6.256.667.851	84,95
	Pengelolaan Sampah	Persentase Pengelolaan Sampah	7.364.949.132	6.256.667.851	84,95
30	Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Tonase sampah yang terangkut/petugas kebersihan/petugas TPA	1.559.407.900	1.298.533.511	83,27
31	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah TPST3R/unit/alat berat	5.805.541.232	4.958.134.340	85,40
Jumlah Total 31 Sub Kegiatan					82,37

BAB IV PENUTUP

Pencapaian kinerja program/kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat tahun anggaran 2022 secara umum, semuanya terlaksana dengan persentase keberhasilan rata – rata 91,33%. Namun dengan capaian kinerja tersebut, tidak berarti bahwa pelaksanaan kegiatan tersebut sudah sempurna dilakukan, masih ada kekurangan-kekurangan yang harus dibenahi guna meningkatkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat ditahun akan datang.

Langkah – langkah yang perlu diambil di masa mendatang untuk meningkatkan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat :

- Perlu peningkatan alokasi anggaran pada program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tanjung Jabung Barat,
- Pemenuhan sarana dan prasarana serta kesejahteraan petugas perlu ditingkatkan lagi
- Sumber daya manusia yang menguasai bidang lingkungan hidup masih kurang. Untuk itu diperlukan pendidikan lingkungan. Khususnya untuk SDM yang ada.

Akhirnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2022 ini dapat kami selesaikan dengan baik. Namun kami masih menyadari ada kekurangan dalam penyusunan laporan ini. Untuk itu kami memerlukan saran dan kritik yang konstruktif guna perbaikan dan penyempurnaan dimasa mendatang.

Demikian laporan ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya di ucapkan terima kasih.